



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu-isu Strategis.....	3
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
1.5 TindakLanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024.....	12
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	20
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2 Realisasi Anggaran	54
3.3 Penghargaan.....	60
 BABIV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Rekomendasi.....	62

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

RKT dan dokumen pendukung lainnya

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat	6
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	7
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Karanganyar	8
Tabel 1.6 : Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi Sakip	12
Tabel 1.7 : Tindak lanjut rekomendasi LKjIP Tahun 2024	13
Tabel 2.1 : Tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja	17
Tabel 2.2 : Strategi dan arah kebijakan	19
Tabel 2.3 : Struktur program dan kegiatan BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	20
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Penetapan	22
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Perubahan	23
Tabel 2.6 : Program dan Kegiatan	24
Tabel 3.1 : Skala Nilai Perangkat Daerah	35
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Tahun 2025	36
Tabel 3.3 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	38
Tabel 3.4 : Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja pada tahun ini dengan beberapa tahun terakhir	39
Tabel 3.5 : Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	40
Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Regional	41
Tabel 3.7 : Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan	43

.....		
Tabel 3.8	: Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	47
Tabel 3.9	: Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan perjanjian kinerja	49
Tabel 3.10	: Realisasi Anggaran	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar	3
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar.....	5
Gambar 2.1 : Dashboard smartsakip	33
Gambar 2.2 : SIPD-RI	33
Gambar 2.3 : E-SPM	34
Gambar 2.4 : Simampu BNPB	34
Gambar 3.1 : Sosialisasi KIE Kepada Anak Usia Dini	52
Gambar 3.2 : Penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana	53
Gambar 3.3 : Evakuasi Kejadian Bencana	53
Gambar 3.4 : Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	54
Gambar 3.5 : Pembentukan Destana	54
Gambar 3.6 : Sosialisasi Sekolah Pendidikan Aman Bencana	56
Gambar 3.7 : Penghargaan BPBD Tahun 2025	61

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tatakepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karanganyar, 23 Februari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar



Hendro Prayitno, S.H., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19760531 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa yang dapat terjadi sewaktu waktu dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Kabupaten Karanganyar menghadapi berbagai potensi bencana baik yang dipengaruhi faktor geografis seperti tanah longsor maupun ancaman hidrometeorologis basah dan kering yang berpotensi menimbulkan banjir, angin puting beliung, longsor hingga kekeringan yang berdampak pada korban jiwa dan kerugian ekonomi. Dalam kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar memegang peran strategis dalam mengurangi risiko bencana, melindungi keselamatan jiwa dan aset masyarakat, serta memastikan pemulihan layanan publik berjalan cepat dan terkoordinasi melalui fungsi perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. BPBD juga berperan sebagai pusat pengelolaan data risiko lokal, penggerak koordinasi lintas sektor bersama OPD, SAR, Kesehatan, dan lembaga sosial, sekaligus memperkuat kapasitas personel, efektivitas penggunaan anggaran, serta fasilitasi dukungan dari pemerintah provinsi, pusat, dan mitra lainnya dalam penanggulangan bencana

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang pembentukan perangkat daerah. Pada tahun 2025 ditetapkan Peraturan Bupati terbaru yang menetapkan BPBD sebagai perangkat daerah tipe A sehingga terjadi penyesuaian struktur organisasi, pembagian tugas, serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada awal tahun anggaran pelaksanaan tugas masih mengacu pada struktur sebelumnya, kemudian dilakukan penyesuaian secara bertahap setelah penetapan regulasi baru. Seluruh proses tersebut menjadi bagian dari masa transisi kelembagaan yang tetap diarahkan untuk memperkuat kinerja organisasi sesuai SOTK terbaru.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2025

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang menetapkan BPBD sebagai perangkat daerah tipe A. Namun dalam implementasinya, penataan organisasi, personel, dan tata kerja masih berlangsung secara bertahap dari struktur sebelumnya tipe B menuju struktur baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPBD mempunyai tugas :

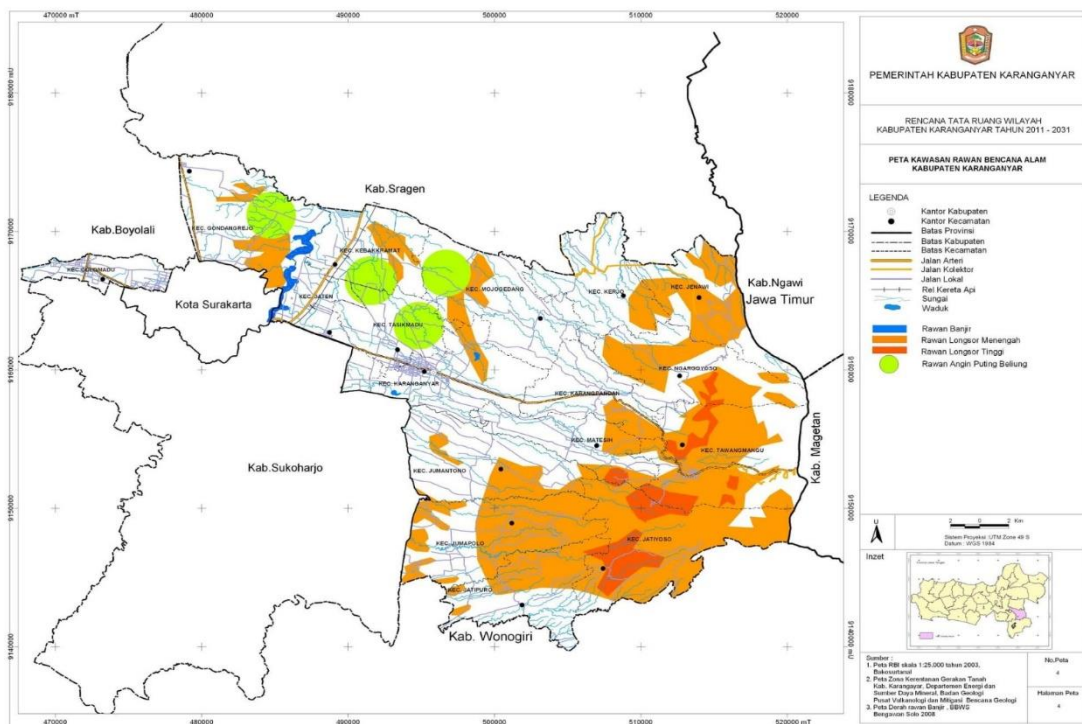
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dengan demikian keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi unsur penting dalam memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan, serta respons yang cepat dan terukur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan mampu menekan risiko bencana dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Seluruh peran tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan kinerja organisasi yang akuntabel serta berorientasi pada perlindungan masyarakat dan ketahanan daerah terhadap bencana.

1.2 Isu-Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi adalah karakteristik Kabupaten Karanganyar yang memiliki resiko bencana yang sedang sampai tinggi. Namun demikian, ancaman bencana tentunya tidak hanya ancaman bencana alam saja, akan tetapi bencana non alam juga perlu menjadi perhatian seperti kegagalan teknologi dan wabah/penyakit. Sehingga manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan perlu dirancang pula untuk mengakomodir upaya-upaya antisipasi terhadap kemungkinan kejadian bencana yang diakibatkan factor non alam tersebut. Seperti yang tergambar pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Peta Rawa Bencana Kabupaten Karanganyar



Sepanjang tahun 2025, tercatat telah terjadi 258 kejadian bencana alam yang didominasi oleh bencana angin puting beliung dan juga tanah longsor serta kebakaran. Bencana alam yang terjadi menimbulkan 621 orang terdampak, diantaranya terdapat korban luka-luka sebanyak 4 jiwa dan meninggal 1 jiwa. Setiap bencana menimbulkan kerugian baik material maupun

nonmateri yang dapat menghambat pembangunan daerah. Selain hal tersebut, Kabupaten Karanganyar yang dalam urusan penanggulangan bencana yang di ampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga menghadapi beberapa isu-isu strategis lainnya yaitu sebagai berikut :

- a. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat belum merata, ditandai dengan masih terbatasnya Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang aktif.
- b. Kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek respons darurat, evakuasi, dan pengelolaan logistik.
- c. Upaya mitigasi bencana belum berjalan optimal, khususnya pada wilayah rawan longsor, banjir, dan kekeringan.
- d. Sistem data dan informasi kebencanaan belum terintegrasi secara optimal sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaporan kinerja.
- e. Koordinasi lintas sektor saat tanggap darurat belum optimal sehingga mempengaruhi kecepatan respons, ketepatan penanganan, dan kualitas layanan kepada masyarakat terdampak bencana

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar diantaranya terdapat sumber daya manusia dan juga sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana.

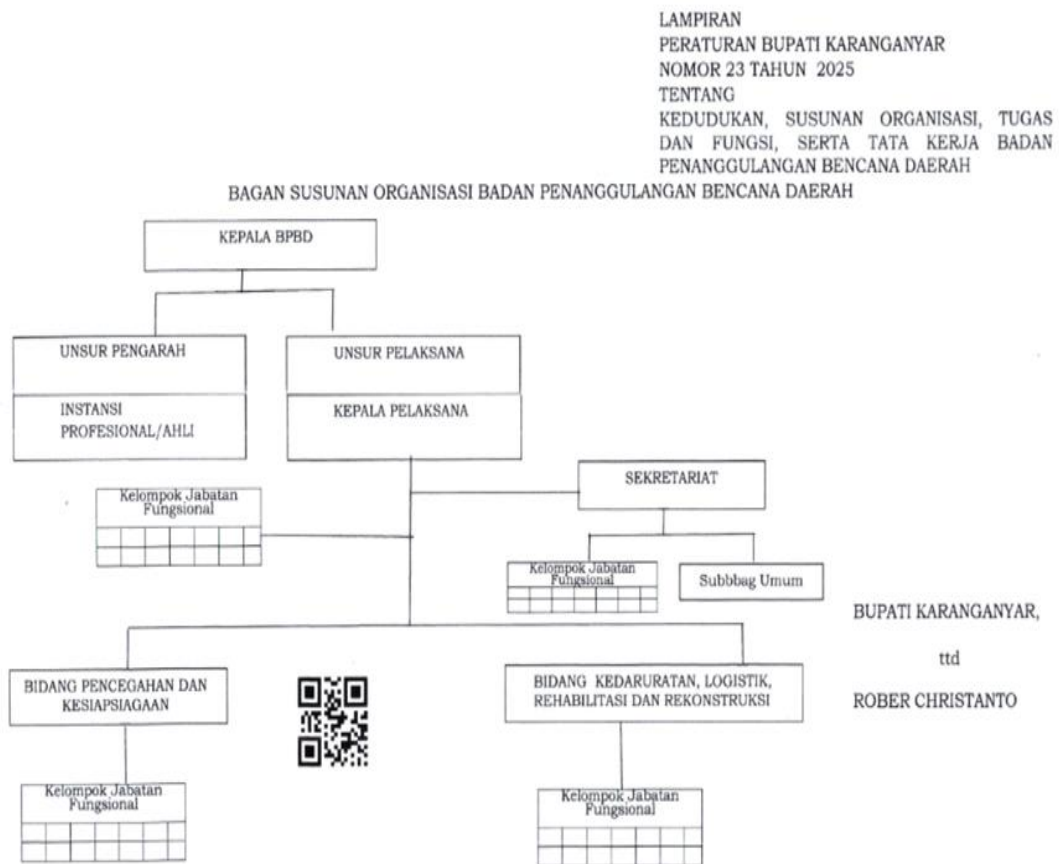
a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

- 1) Kepala BPBD (ex – officio)
- 2) Unsur Pengarah
- 3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a) Kepala Pelaksana;
 - b) Kepala Sekretariat;

- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d) Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - e) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4) Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar



Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar sejumlah 63 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara berjumlah 21 Orang yang terdiri dari 18 Orang PNS dan 3 Orang PPPK Penuh Waktu serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 41 Orang dengan komposisi sebagai berikut :

5) **Berdasarkan Jabatan**

Gambar 1.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	4
4	Kelompok Jabatan Fungsional	4
5	Pelaksana	12
Jumlah		21

6) **Berdasarkan Pangkat/Golongan**

Tabel 1.2 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Gol

No	Pangkat	Gol	Jumlah
1	Pembina Tk I	IV/b	1
2	Pembina Tk I	IV/a	1
3	Penata Tk I	III/d	5
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tk I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur Tk I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	2
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	1
11	Golongan V	-	3
Jumlah			21

7) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Non ASN	Jumlah
1	S2	5	-	-	-	5
2	S1	11	-	-	2	11
3	DIII	2	-	5	-	7
4	SMA Sederajat	-	3	34	1	38
Jumlah		18	3	39	3	63

8) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Non ASN	Jumlah
1	Laki-Laki	14	3	34	1	52
2	Perempuan	4		5	2	11
Jumlah		18	3	39	3	63

b. Sarana - Prasarana

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

- 1) Tanah Perkantoran seluas 6,560 m2 yang di atasnya dibangun Gedung kantor yang terdiri dari Ruang kerja pimpinan, ruang kerja seksi, ruang pertemuan dan 1 unit Gudang.
- 2) Sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	STATION WAGON OPERASIONAL KEPALA	Unit	1		1
2	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
3	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
4	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
5	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
6	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
7	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
8	TRUCK + ATTACHMENT OPERASIONAL DAPUR UMUM	Unit	1		1
9	PICK UP OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
10	PICK UP OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
11	MOBIL JENAZAH OPERASIONAL AMBULAN	Unit	1		1
12	MOBIL TANGKI AIR OPERASIONAL TANGKI AIR	Unit	1		1
13	SEPEDA MOTOR	Unit	10		9
14	SEPEDA MOTOR	Unit	1		1
15	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	2		2
16	AIR CONDITIONING (AC)	Unit	12		12
17	SOUND SYSTEM	Unit	3		3
18	CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	Unit	2		2
19	LCD PROJECTOR/INFOCUS	Unit	2		2
20	PORTABLE GENERATING SET TOWER	Unit	3		3
21	MEGAPHONE	Unit	2		2
22	ALAT PEMADAM/PORTABLE	Tabung	5		5
23	PERSONAL COMPUTER	Unit	17		17
24	LAP TOP	Unit	11		11

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
25	SERIAL PRINTER	Unit	17		17
26	TABLET PC	Unit	1		1
27	MONITOR	Unit	1		1
28	HANDY TALKY (HT)	Unit		2	2
29	UNIT TRANCEIVER VHF PORTABLE	Unit	4		4
30	UNIT TRANCEIVER SSB PORTABLE	Unit	1		2
31	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF LAINNYA (DST)	Unit	1		1
32	FACSIMILE	Unit	1		1
33	TELEPON ANALOG	Unit	1		1
34	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE LAINNYA (DST)	Unit	2		2
35	GERGAJI CHAIN SAW	Unit	5	2	7
36	PERAHU KARET (ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS)	Unit	7	1	8
37	SPEED BOAT / MOTOR TEMPEL	Unit	6	1	7
38	POMPA AIR/ALCONE	Unit	4	2	6
39	POMPA AIR 23 HP/POMPA AIR PEMADAM	Unit	5		5
40	TANKS (TABUNG SELAM)	Unit	2		2
41	BREATHING APPARATUS	Unit	2		2
42	MESIN BOR BETON	Unit	1		1
43	MESIN GERGAJI BESI	Unit	2		1
44	TENDA PLETON	Unit	6		6
45	TENDA POSKO	Unit	6		6
46	TENDA REGU/PENGUNGSI	Unit	2		2
47	TENDA KELUARGA	Unit	6		6
48	KOMPRESSOR SELAM	Unit	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
49	EARLY WARNING SYSTEM TANAH LONGSOR DAN BANJIR	Unit	26		26
50	TELEVISI	Unit	5		5
51	SOUND SYSTEM	Unit	3		3
52	CAMERA VIDEO	Unit	4		4

- 3) Ruang dan peralatan PUSDALOPS sebanyak 1 unit;
- 4) Media informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi berupa :
 - a) Instagram : @bpbdkaranganyar
 - b) Facebook : BPBD Kabupaten Karanganyar
 - c) Telepon : (0271) 495997
 - d) Whatsspp : 08112637243
 - e) Website : bpbd.karanganyarkab.go.id
 - f) Email : bpbd@karanganyarkab.go.id

c. Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar didukung dengan 2 Program, 4 Indikator Program dengan anggaran Rp 5.781.245.649,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Penanggulangan Bencana Daerah, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 2.410.713.600,- (Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tigas Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 3.370.532.049,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dan Tindak Lanjut Perbaikan Internal.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Isu-Isu Strategis
- 1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
- 1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tujuan, sasaran dan indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan, perjanjian kinerja serta instrumen pendukung capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Penghargaan

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi SAKIP Tahun 2025	Tindaklanjut
1.	Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat koordinasi pegawai dan melalui penggunaan aplikasi smartsakip secara berkala (setiap triwulan) atas pelaksanaan rencana aksi
2.	Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja dengan berkoordinasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar. Dalam SOP dimaksudkan agar	Melaksanakan penyusunan, penetapan serta evaluasi atas revisi SOP Pengumpulan Kinerja dan Capaian Kinerja

No.	Rekomendasi SAKIP Tahun 2025	Tindaklanjut
	dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang.	
3.	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebelum ditetapkan	Menyusun dan mengajukan surat permintaan revidi laporan kinerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Rekomendasi atas rekomendasi LKjIP tahun 2024 berupa tindak lanjut yang sudah dilakukan pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi LKjIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi SAKIP Tahun 2024	Tindaklanjut
1.	Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang. Dalam SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan kegiatan revidi data kinerja oleh APIP. Pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja internal agar dilaksanakan mempedomani SOP dimaksud dan dilaksanakan secara berkala (bulanan/tribulan/tahunan) dan berkelanjutan.	Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja sehingga pelaksanaan pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja internal mempedomani SOP yang telah ditetapkan tersebut dan melaksanakan evaluasi secara berkala.
2.	Mulai tahun 2024 agar menggunakan aplikasi Smartsakip Kabupaten Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal yaitu : 1) Melengkapi/menginput ke dalam menu data Renstra dengan informasi : a) Sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target	Melaksanakan penggunaan aplikasi smartsakip dengan melengkapi/menginput secara lebih optimal dalam pengukuran capaian kinerja sehingga dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja dapat menggunakan informasi yang tersedia dalam aplikasi smartsakip.

No.	Rekomendasi SAKIP Tahun 2024	Tindaklanjut
	kinerjanya masing-masing. b) Definisi operasional dari indikator kinerja, formulasi perhitungan dan sumber data. 2) Melengkapi/Menginput ke dalam menu progress kinerja dengan informasi: a) Tujuan dan indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya masing-masing setiap bulan. b) Factor penghambat dan factor pendorong kinerja. 3) Menggunakan informasi kinerja dalam aplikasi smartsakip untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja 4) Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi Smartsakip sebagai acuan dalam pemberian reward dan punishment.	
3.	Melengkapi laporan kinerja dengan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/kegiatan	Dalam menyusun laporan kinerja tahun 2025, telah dilengkapi dengan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/kegiatan.
4.	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.	Membuat dan mengirimkan surat permintaan review laporan kinerja tahunan kepada inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.
5.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan tepat waktu.	Telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang diformalkan pada waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Guna mewujudkan ketercapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian target Pembangunan daerah, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.

Berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah :

“ Meningkatkan Daya Saing Daerah ”

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
2. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi local
3. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
4. Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan

Selanjutnya, dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga ditetapkan tujuan yang akan di capai pada tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan;

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar pada periode Renstra Tahun 2024 dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan wilayah yang Tangguh Bencana; dan
- b. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.

Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Stragis dan Indikator Kinerja Tahun 2024 - 2026

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
								2024	2025	2026	
1	Meningkatkan wilayah Tangguh Bencana Berbasis Lingkungan	Indeks Resiko Bencana			Berdasarkan Penilaian BNPB	Indeks	90	82	81	80	80
			Meningkatkan wilayah yang Tangguh Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana di bagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	%	10,73	22,03	25,98	31,07	31,07
2	Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokasi			Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	64	72	73	75	75
			Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	Skor	72	72,2	72,5	73	73

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana jangka menengah hingga panjang yang menetapkan langkah-langkah utama untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Kebijakan adalah aturan atau pedoman yang mengarahkan tindakan sehari-hari agar pelaksanaan program konsisten dengan tujuan tersebut. Keduanya membentuk arah kebijakan yang merupakan perumusan prioritas operasional yang menerjemahkan strategi menjadi fokus-fokus konkret sehingga sumber daya dan program diarahkan pada hal-hal yang paling menentukan keberhasilan. Dengan demikian arah kebijakan berfungsi sebagai jembatan antara gagasan strategis dan tindakan nyata di lapangan, sekaligus sebagai filter alokasi sumber daya dan tolok ukur evaluasi yang dapat membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada konteks meningkatkan wilayah Tangguh Bencana memiliki kekuatan yaitu tidak hanya mengurangi dampak langsung bencana, tetapi juga memperkuat modal social Masyarakat menjadi lebih solid dan kuat dalam menghadapi bencana. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu tersedianya dukungan kebijakan dan akses untuk program penanggulangan bencana serta integrasi Pembangunan yang berkelanjutan dengan pengurangan risiko bencana. Tantangan yang dihadapi berupa kurangnya integrasi lintas sektor yang masih tumpang tindih hingga ketidakpastian perubahan iklim yang menjadi factor eksternal yang tidak dapat di hindarkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada konteks meningkatkan tata kualitas tata laksana pemerintahan memiliki kekuatan yaitu adanya kerangka regulasi dan kebijakan yang kuat dan terstruktur yang lengkap. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu mewujudkan kualitas pelayanan dan informasi public yang cepat, transparan sehingga meningkatkan kesadaran public mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengawasan serta perencanaan daerah. Tantangan yang dihadapi yaitu belum optimalnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan birokrasi yang semakin berkualitas. Perumusan strategi dan arah kebijakana dituangkan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	a. meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana dan mengurangi risiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas penduduk di desa-desa yang berada di daerah rawan bencana	a. meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan
	b. membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya	b. standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
	c. penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat, dan akurat	c. pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana
	d. melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	d. prosedur tetap (protap) penyelenggaraan penanggulangan bencana
	e. mempercepat penyusunan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	e. peningkatan kapasitas masyarakat
	f. memperkuat kerjasama antar lembaga terkait	f. pembentukan dan pengembangan forum pengurangan resiko bencana
		g. Pembentukan desa tangguh bencana
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	a. meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi perangkat daerah	a. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan pelayanan publik melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait, perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Arah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki 2 (dua) program diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari 2 (dua) program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2025
Program Penanggulangan Bencana		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana	%	100
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan	%	100

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2025
		kesiapsiagaan terhadap bencana		
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	86
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Keuangan BPBD	%	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Kepegawaian BPBD	%	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Umum BPBD	%	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksana nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2025
	Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Penyediaan Jasa Penunjang BPBD	%	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD	%	100

2.4 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini, yaitu :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Penetapan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Wilayah Tangguh Bencana Berbasis Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	85,74
	Sasaran 1: Meningkatkan Wilayah Yang Tangguh Bencana	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	25,98
2.	Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73
	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Skor	72,50

Namun, dengan adanya realisasi capaian pada indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 85,74 Pada Tahun 2024 yang telah melampaui target yang telah ditetapkan, maka terdapat perubahan target yang telah disesuaikan dengan RKPD Perubahan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Wilayah Tangguh Bencana Berbasis Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	85,74
	Sasaran 1: Meningkatkan Wilayah Yang Tangguh Bencana	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	25,98
2.	Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86
	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Skor	72,50

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 2 program, 11 kegiatan yang di dukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 5.781.245.649,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan anggaran digunakan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran. Berikut rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Rp2.410.713.600
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana	100 %	Rp62.600.600
3.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	Rp2.650.000
4.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana	2000 Orang	Rp59.950.600
5.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Rp223.329.750

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
6.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	45 Keluarga	Rp20.000.000
7.	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kawasan	Rp95.696.000
8.	Penguatan Kapasitas Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang di tingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	6 Kawasan	Rp30.000.000
9.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	250 Orang	Rp30.136.500
10.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	20 Orang	Rp14.141.400
11.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	1 Dok	Rp5.000.000
12.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasikan	1 Dok	Rp2.500.000
13.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	Rp2.500.000
14.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10 Dok	Rp15.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
15.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp3.280.850
16.	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah resiko bencana (per jenis ancaman, bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	Rp5.075.000
17.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Rp1.842.437.700
18.	Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana kabupate/kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, di tolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	600 Orang	Rp1.661.044.000
19.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400 Orang	Rp150.000.000
20.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat bencana	1 Laporan	Rp2.265.600
21.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	SK Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dok	Rp4.015.150

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
22.	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah dan legal	1 Dok	Rp22.112.950
23.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	20 Orang	Rp3.000.000
24.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	Rp282.345.550
25.	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi bencana yang tersedia	1 Dok	Rp15.000.000
26.	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terjalinnya kerjasama dengan kelompok relawan (penyerahan hibah untuk kelompok relawan di kabupaten karanganyar)	1 Dok	Rp146.785.000
27.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	1 Dok	Rp1.418.850
28.	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Laporan	Rp15.011.000
29.	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	Rp17.633.700

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
30.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P)	37 Orang	Rp41.000.000
31.	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dok	Rp1.975.000
32.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	62 Orang	Rp35.000.000
33.	Peningkatan Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten karanganyar	Jumlah Keterlibatan Kelompok Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Meliputi Lembaga Non Pemerintah Antara Lain : Lembaga Filantropi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Relawan, Dunia, Usaha yang Telah Terdaftar dan Legal	10 Lembaga	Rp3.500.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
34.	Fasilitasi Pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah Data Penduduk Terpilah Di Daerah Rawan Bencana	1 Laporan	Rp1.400.000
35.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah Dan Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) Tahun	1 Dok	Rp3.000.000
36.	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) Tahun	1 Dok	Rp622.000
37.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK yang tercapai targetnya)	86 %	Rp3.370.532.049
38.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Rp24.477.000
39.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	Rp23.852.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
40.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	Rp625.000
41.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD	100 %	Rp2.337.977.149
42.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang / Bulan	Rp2.337.330.149
43.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Rp647.000
44.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD	100 %	Rp42.250.000
45.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	Rp42.250.000
46.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum BPBD	100 %	Rp200.000.000
47.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Paket	Rp8.000.000
48.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Paket	Rp8.000.000
49.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan	22 Paket	Rp15.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
50.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	Rp8.000.000
51.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	8 Laporan	Rp6.000.000
52.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp152.000.000
53.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis skpd	60 Dok	Rp3.000.000
54.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang BPBD	100 %	Rp77.600.000
55.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	10 Laporan	Rp2.000.000
56.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	Rp75.600.000
57.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD	100 %	Rp679.215.400
58.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	Rp506.068.900
59.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	56 Unit	Rp83.146.500
60.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	Rp90.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
61.	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp9.012.500
62.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Unit	Rp9.012.500
TOTAL				Rp5.781.245.649

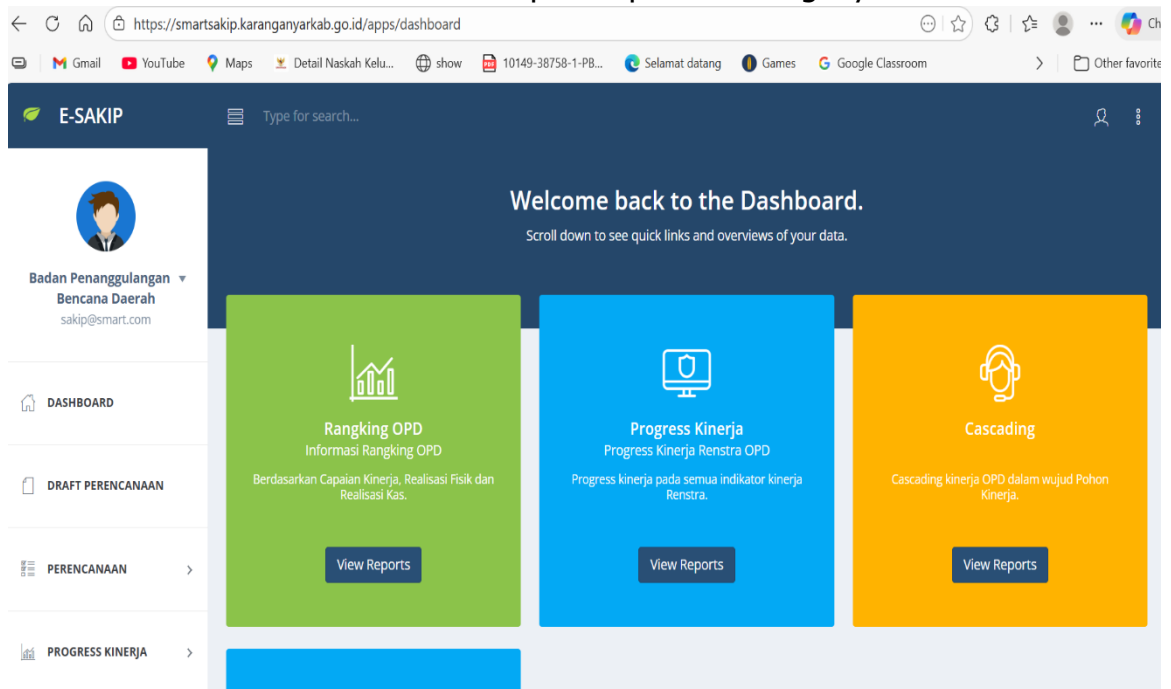
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna mendukung tercapainya kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan good governance, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar wajib menggunakan aplikasi untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD. Aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain :

a. Smartsakip

Aplikasi smartsakip merupakan Instrument pendukung dalam bentuk aplikasi yang menjadi sarana perencanaan, pemantauan dan juga evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam mengidentifikasi perencanaan serta progress kinerja opd. Smartsakip tersebut dapat diakses melalui laman <https://smartsakip.karanganyarkab.go.id/>.

Gambar 2.1 Smartsakip Kabupaten Karanganyar



b. SIPD-RI

SIPD-RI merupakan aplikasi yang digunakan dalam perencanaan anggaran hingga penatausahaan anggaran. Sehingga melalui penggunaan aplikasi ini, dapat diketahui anggaran yang direncanakan hingga direalisasikan oleh tiap-tiap instansi. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui laman <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>.

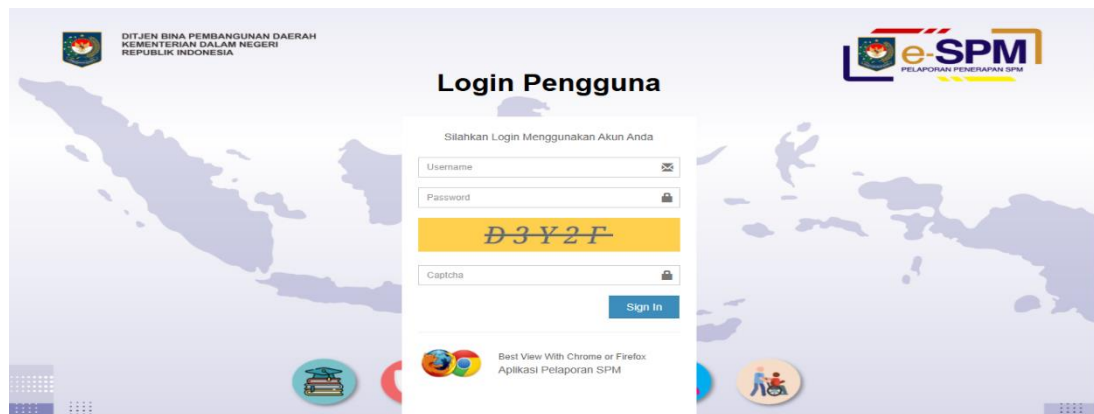
Gambar 2.2 SIPD-RI



c. E-SPM Bangda Kemendagri

E-SPM merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melaporkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu jenis dan mutu pelayanan dasar yang diterima oleh warga negara yang seperti pendidikan, kesehatan dan BPBD dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

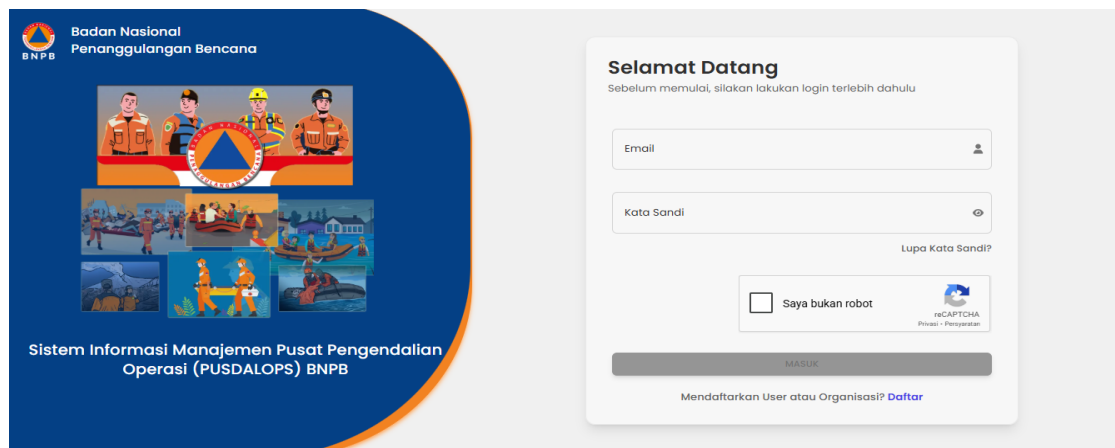
Gambar 2.3 E-SPM Kemendagri



d. Simampu BNPB

Sistem Informasi Manajemen Pusat Pengendalian Operasional BNPB (Simampu) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BNPB untuk memantau dan melaporkan status kedaruratan bencana di Indonesia. Sehingga melalui platform tersebut, masyarakat maupun pemerintah dapat mengetahui status bencana secara cepat dan akurat.

Gambar 2.4 Simampu BNPB



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan kinerja tahun ke-2 dan terakhir pada periode Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 103,21% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, berdasarkan PermenPANRB No. 22 Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja

Skala Nilai	Kategori
>100%	Istimewa
>85 – 100%	Baik
>60 – 85%	Butuh Perbaikan
>20 – 60%	Kurang
Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Pada tahun 2025, secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator

kinerja program yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, terdapat 2 (dua) Program strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang harus diwujudkan, yaitu :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan		Indeks Resiko Bencana	Indeks	87.54	82.14	106.57	80
		Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	25.98	27.68	106.54	31.07
2	Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86	85.58	99.51	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip	Skor	72.5	72.4	99.86	73

Berdasarkan berdasarkan tabel 3.2, dari Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar diatas terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu Tujuan 1 "meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan" dan sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana dan 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai / di bawah target yang ditetapkan yaitu Tujuan 2 " meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi" dan sasaran strategis 2 "Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan".

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dengan 2 indikator tercapai dalam kategori “istimewa” dan “baik. Indikator pertama, Indeks Risiko Bencana meraih realisasi sebesar 82,14 penilaian dari BNPB dari target 87,42 dengan capaian sebesar 106,43%. Salah satu faktor tercapainya indikator tersebut adalah adanya sinergi antar para pemangku kepentingan mengenai kebencanaan serta adanya program/kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas yang dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap Indeks Risiko Bencana ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Tujuan pertama memiliki 1 (satu) sasaran strategis I yaitu “Meningkatnya wilayah yang tangguh bencana” yang memiliki 1 (satu) indikator masuk kedalam kategori “istimewa”. Indikator kinerja yang digunakan yaitu “persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana” yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui jumlah desa/kelurahan yang telah mendapatkan penilaian ketangguhana desa sehingga dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan sehingga desa/kelurahan dapat mengarahkan upaya mereka dalam mencegah, menghadapi hingga penanganan bencana ketika terjadi secara maksimal dan terpadu.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya wilayah yang Tangguh bencana tersebut di peroleh melalui formulasi desa/kelurahan tangguh bencana / desa rawan bencana x 100%. Sampai dengan tahun 2025, telah terbentuk sejumlah 49 desa/kelurahan dari 177 desa rawan bencana yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan target sebelumnya yaitu terbentuk 46 Desa/kelurahan tangguh bencana. Hal tersebut menunjukkan adanya capaian sebesar 106,56%. Faktor utama tercapainya indikator tersebut adalah adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembentukkan desa/kelurahan tangguh bencana yang tidak hanya di danai oleh APBD Kabupaten Karanganyar, namun terdapat desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk melalui pendanaan dana desa juga kerja sama dengan akademisi

universitas. Hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai kebencanaan.

Tujuan kedua yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi tercapai dalam kategori “baik”, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 99,51%. Adapun faktor yang mendukung tujuan ini adalah kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Tujuan II ini memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja Nilai Sakip masuk kedalam kategori “Baik”. Pada tahun 2025, perolehan nilai sakip BPBD Kabupaten Karanganyar adalah 72,40. Tingkat capaiannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena SAKIP selalu menjadi penekanan untuk ditingkatkan capaiannya diperangkat daerah melalui berbagai upaya sistematis dan terstruktur oleh pimpinan daerah. Dengan adanya langkah-langkah sistematis yang dilakukan secara terstruktur tersebut maka akuntabilitas meningkat seiring dengan berbagai perbaikan internal yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar.

Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	87,42	82,14	106,43	Istimewa	BNPB
	Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	25,98	27,68	106,56	Istimewa	BPBD Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85,58	99,51	Baik	KemenpanRB
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip	72,5	72,40*	99,86	Baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

* : merupakan capaian Tahun 2024

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3tahun)

Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 dilakukan dengan merujuk kepada target capaian kinerja yang terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja pada tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Na	Na	Na	82	87,71	93,49	87,4	82,14	106,43
	Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	10,73	18,08	168,50	22,03	24,58	111,58	25,98	27,68	106,56
2	Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Na	Na	Na	72,00	85,74	119,08	86,00	85,74	99,70
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip	Skor	72	71,20	98,9	72,2	72,4	100	72,5	72,40	99,9

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya rata-rata mencapai target setiap tahunnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	82,14	80	97,39
	Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	27,68	31,07	89,10
2.	Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	85,58	75	114,11
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip	72,40	73	99,18

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, hanya indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang telah melebihi target. Sedangkan untuk tujuan 1 dan 2 (dua) sasaran strategis lainnya belum dapat melampaui target akhir Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar dan realisasi nasional/regional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja nasional dan regional/Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar regional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Regional
1.	Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana	82,14	92,37
2.	Meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	27,68	Na
3.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi	85,74	Na
4.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip	72,40	82,00*

Ket :

* : Capaian pada tahun 2024

Sumber : a. Surat dari BNPB Perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah
b. Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui perbandingan capaian kinerja pada tujuan dan sasaran stretegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Pada Tujuan, realisasi capaian di perbandingkan dengan capaian regional yaitu Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada sasaran strategis, terdapat indikator yang tidak menjadi standar regional maupun

nasional, sehingga hanya capaian pada nilai Sakip yang dapat dibandingkan dengan capaian nilai sakip yang diperoleh oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian Sasaran Stratgis dan Indikator Kinerja Tahun 2025 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus di evaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja tahun 2025 adalah 106,43% dan 99,51%.

Pada level sasaran dengan 2 (dua) indikator, yang tercapai diatas 100% adalah pada indikator sasaran persentase desa/kelurahan tangguh bencana sedangkan pada indikator sasaran nilai sakip tercapai dengan kategori "baik". Hal yang mendukung pencapaian kinerja yaitu antara lain pengoptimalan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan efektivitas kinerja.

Secara keseluruhan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2025 BPBD Kabupaten Karanganyat dapat dilihat pada tabe 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta alternative sokusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	87.42	82.14	106.43	Adanya sinergi antar para pemangku kepentingan mengenai kebencanaan serta adanya program/kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas yang dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana.	Dengan melaksanakan penilaian secara berkala terhadap Indeks Risiko Bencana yang dapat dilakukan sebagai perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana setiap periode tertentu
	Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	25.98	27.68	106.56	Keberhasilan pada sasaran strategis ini ditunjang dengan memaksimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan yang terpadu dan komprehensif. Selain	a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia baik secara internal maupun stakeholder penanggulangan bencana

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						itu, adanya kesadaran pentingnya pengetahuan mengenai kebencanaan yang dibutuhkan masyarakat sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam memperoleh layanan informasi kebencanaan di daerah rawan bencana.	b. memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat secara formal maupun nonformal c. melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan pencapaian target
2	Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85.58	99.51	Perlunya upaya dalam pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia	Menyelenggarakan fasilitasi, monitoring hingga evaluasi dalam pelaksanaan indikator indeks reformasi birokrasi setiap tahunnya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip	72.5	72.40	99.86	Capaian terhadap indikator kinerja nilai sakip menunjukkan tren yang cukup positif. Hal tersebut didukung oleh kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang semakin baik salah satunya dengan penggunaan aplikasi Smartsakip Kabupaten Karangnyar	Menyelenggarakan fasilitasi, monitoring hingga evaluasi dalam pelaksanaan sakip setiap tahunnya

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.781.245.649,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.542.564.390,- atau sebesar 95,87% terdapat efisiensi sebesar 1,07%. Pada sasaran strategis pertama, meningkatkan wilayah yang tangguh bencana pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp2.410.713.600,- dan realisasi sebesar Rp2.355.211.299,- atau 97,70% dan terdapat efisiensi sebesar 1,09%. Sedangkan untuk sasaran strategis dua, yaitu meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah didukung dengan anggaran sebesar Rp Rp3.370.532.049,- dengan realisasi sebesar Rp3.187.353.091,- atau 94,57% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,06%.

Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPBD Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	25,98	27,68	106,56	Rp2.410.713.600,00	Rp2.355.211.299,00	97,70	1,09
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	72,5	72,40	99,9	Rp3.370.532.049,00	Rp3.187.353.091,00	94,57	1,06

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) indikator sasaran, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata Tingkat capaian kinerja tiap sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung.

Pada sasaran pertama meningkatnya wilayah yang tangguh bencana dengan indikator kinerja persentase desa/kelurahan yang tangguh bencana memiliki tingkat capaian sebesar 106.56% dengan capaian program sebesar 100%. Jika diperbandingkan ditingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat kesesuaian sebesar 106,56%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program penanggulangan bencana memiliki sinergi dan keselarasan dalam pencapaian kinerja pada sasaran strategis pertama. Sinergi ini ditunjukkan dengan pelaksanaan program penanggulangan bencana dengan beberapa kegiatan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Sasaran kedua dengan indikator Nilai Sakip memiliki Tingkat capaian sebesar 99,86%, sedangkan capaian program yang mendukung sebesar 83%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat Tingkat kesesuaian sebesar 120,31%. Sinergi pelaksanaan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada table 3.9

Tabel 3.9

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	106,43					
Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	106,56					Menunjang
			Program Penanggulangan Bencana		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Menunjang
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Menunjang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Menunjang
				Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana	100	Menunjang
				Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Menunjang
				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Menunjang
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	Menunjang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	99,51					
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip	99,86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	83	Menunjang
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Keuangan BPBD	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Kepegawaian BPBD	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Umum BPBD	100	Menunjang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Penyediaan Jasa Penunjang BPBD	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD	100	Menunjang

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang menunjang capaian kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025, yaitu antara lain :

Gambar 3.1 Sosialisasi KIE kepada Anak Usia Dini



Gambar 3.2 Penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana



Gambar 3.3 Evakuasi Kejadian Bencana



Gambar 3.4 Peningkatan Kapasitas TRC BPBD



Gambar 3.5 Pembentukan Destana



Gambar 3.6 Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana



3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, didukung dengan APBD sebesar Rp 5.781.245.649,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar 95,87%. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp2.410.713.600	Rp2.355.211.299	97,70
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp62.600.600	Rp62.600.600	100,00
3.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Rp2.650.000	Rp2.650.000	100,00
4.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp59.950.600	Rp59.950.600	100,00
5.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp223.329.750	Rp222.253.900	99,52
6.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp20.000.000	Rp20.000.000	100,00
7.	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp95.696.000	Rp94.946.000	99,22
8.	Penguatan Kapasitas Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Rp30.000.000	Rp30.000.000	100,00
9.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp30.136.500	Rp29.891.500	99,19

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
10.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp14.141.400	Rp14.141.400	100,00
11.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00
12.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rp2.500.000	Rp2.500.000	100,00
13.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp2.500.000	Rp2.500.000	100,00
14.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp15.000.000	Rp15.000.000	100,00
15.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Rp3.280.850	Rp3.200.000	97,54
16.	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp5.075.000	Rp5.075.000	100,00
17.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp1.842.437.700	Rp1.789.183.950	97,11
18.	Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana kabupate/kota	Rp1.661.044.000	Rp1.608.199.000	96,82

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
19.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Rp150.000.000	Rp150.000.000	100,00
20.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Rp2.265.600	Rp1.872.000	82,63
21.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Rp4.015.150	Rp4.000.000	99,62
22.	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Rp3.000.000	Rp3.000.000	100,00
23.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Rp22.112.950	Rp22.112.950	100,00
24.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp282.345.550	Rp281.172.849	99,58
25.	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp15.000.000	Rp14.202.299	94,68
26.	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp146.785.000	Rp146.785.000	100,00
27.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp1.418.850	Rp1.418.850	100,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
28.	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp15.011.000	Rp15.011.000	100,00
29.	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp17.633.700	Rp17.633.700	100,00
30.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp41.000.000	Rp40.625.000	99,09
31.	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/ kota	Rp1.975.000	Rp1.975.000	100,00
32.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp35.000.000	Rp35.000.000	100,00
33.	Peningkatan Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten karanganyar	Rp3.500.000	Rp3.500.000	100,00
34.	Fasilitasi Pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Rp1.400.000	Rp1.400.000	100,00
35.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Kab/Kota	Rp3.000.000	Rp3.000.000	100,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
36.	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Rp622.000	Rp622.000	100,00
37.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp3.370.532.049	Rp3.187.353.091	94,57
38.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp24.477.000	Rp23.672.000	96,71
39.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp23.852.000	Rp23.672.000	99,25
40.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp625.000	Rp0	0,00
41.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.337.977.149	Rp2.161.901.584	92,47
42.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.337.330.149	Rp2.161.254.584	92,47
43.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp647.000	Rp647.000	100,00
44.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp42.250.000	Rp42.171.675	99,81
45.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp42.250.000	Rp42.171.675	99,81
46.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp200.000.000	Rp197.920.580	98,96

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
47.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp8.000.000	Rp8.000.000	100,00
48.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp8.000.000	Rp7.982.600	99,78
49.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp15.000.000	Rp13.000.000	86,67
50.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp8.000.000	Rp8.000.000	100,00
51.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp6.000.000	Rp5.980.000	99,67
52.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp152.000.000	Rp151.957.980	99,97
53.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp3.000.000	Rp3.000.000	100,00
54.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp77.600.000	Rp75.128.060	96,81
55.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.000.000	Rp1.920.000	96,00
56.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp75.600.000	Rp73.208.060	96,84
57.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp679.215.400	Rp677.859.192	99,80
58.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp506.068.900	Rp505.529.526	99,89
59.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp83.146.500	Rp83.131.900	99,98

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
60.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp90.000.000	Rp89.197.766	99,11
61.	Pengadaan Mebel	Rp9.012.500	Rp8.700.000	96,53
62.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp9.012.500	Rp8.700.000	96,53
TOTAL		Rp5.781.245.649	Rp5.542.564.390	95,87%

3.3 Penghargaan

Pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar menerima penghargaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusdalops dengan Pelaporan Terbaik I dalam penyampaian data dan informasi Penanggulangan Bencana.

Gambar 3.7 Penghargaan BPBD Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta didukung oleh pemanfaatan anggaran yang cukup efektif. Capaian kinerja pada beberapa sasaran menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, antara lain pada tata kelola kinerja, kapasitas sumber daya, integrasi data kebencanaan, serta koordinasi lintas sektor agar pelayanan penanggulangan bencana semakin cepat, tepat, dan berdampak bagi masyarakat.

B. Rekomendasi

Mensikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Memperkuat perencanaan penanggulangan bencana berbasis risiko sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan, respons darurat, serta pemulihan pascabencana;
3. Mengembangkan sistem data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja;
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor terutama pada fase tanggap darurat untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan;
5. mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber pendanaan penanggulangan bencana secara lebih efektif dan tepat sasaran;
6. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja agar setiap program memberikan dampak nyata terhadap penurunan risiko bencana dan perlindungan masyarakat

Berdasarkan rekomendasi tersebut, diperlukan komitmen dan perhatian yang lebih terarah dalam memperkuat perencanaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan sistem data kebencanaan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan anggaran. Upaya ini diharapkan mampu mendorong konsistensi pelaksanaan strategi organisasi, meningkatkan kualitas capaian kinerja, serta memastikan setiap program penanggulangan bencana memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, langkah tersebut akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Karanganyar, sekaligus mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan.

LAMPIRAN